

PENGANTER REDAKSI

SOSIOKONSEPSIA Vol. 5 Nomor 02, Januari – April 2016 ini menyajikan informasi hasil-hasil penelitian yang cukup menarik, yaitu berkaitan dengan remaja, orang dengan kecacatan, lanjut usia, gelandangan dan pengemis, penyuluhan sosial dan program kesejahteraan sosial di daerah tertinggal. Informasi tersebut diharapkan dapat menginspirasi pihak terkiat guna penyempurnaan dan pengembangan program kesejahteraan sosial.

Permasalahan remaja tidak pernah berhenti, laksana patah tumbuh hilang berganti dari waktu ke waktu. Tawuran dan anarkis, merupakan bentuk perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari dunia remaja. Padahal, di sisi lain pada setiap remaja itu sesungguhnya memiliki potensi yang besar. Hari Harjanto dalam hasil penelitiannya yang berjudul Penanganan Permasalahan Tawuran Remaja Melalui Pusat Pengembangan Remaja (PPR) Di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, memberikan informasi mengenai tawuran remaja dan upaya yang dilakukan oleh sebuah komunitas untuk mengatasi permasalahan remaja. Di Kelurahan Cipinang Utara berdiri Pusat Pengembangan Remaja (PPR). Lembaga ini sebagai media pelayanan sosial yang berupaya membantu para remaja dalam mentasi kesulitan dan hambatan dalam mengakses pelayanan social. Melalui PPR ini potensi remaja akan dikembangkan, dan di sisi lain permasalahan remaja akan dieliminasi.

Orang dengan kecacatan fisik memiliki hak untuk memperoleh pelanan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial yang disediakan oleh pemerintah. Mulia Astuti menyampaikan hasil penelitiannya dengan judul Efektivitas Pelayanan Panti Sosial Bina Daksa. Panti ini dikelola pemerintah yang berupaya memerikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi orang dengan kecacatan daksa, sehingga nantinya mereka memiliki kemandirian, dalam arti mereka mampu mengurus dirinya sendiri. Menurut penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian orang dengan kecacatan daksa, yaitu kondisi kedisabilitasan, dukungan keluarga dan lingkungan sosialnya, proses rehabilitasi, pimpinan dan lingkungan di tempat kerja, teman sesama disabilitas, dan aksesibilitas terhadap berbagai pelayanan sosial di lingkungannya.

Bencana alam terjadi di berbagai wilayah Indonesia setiap tahun. Peristiwa ini tentu akan menimbulkan penderitaan bagi penduduk yang terkena dampak bencana, tidak terkecuali kelompok lanjut usia. Hasil penelitian mengenai kualitas hidup lanjut usia di daerah rawan bencana disajikan oleh Husmiati, Irmayani, Ivo Noviana, Ayu Diah Amalia dengan lokus di Pangalengan Jawa Barat. Dikemukakan, bahwa program pelayanan sosial bagi lansia di Desa Sukamanah belum menjadi prioritas, padahal populasi lansia di kecamatan ini cukup besar.

Permasalahan sosial lain yang juga masih perlu perhatian semua pihak, yaitu gelandangan dan pengemis. Pada umumnya mereka ini berkeliaran di perkotaan yang mengganggu keindahan kota dan ketertiban umum. Hasil penelitian Ruaida Murna, bahwa pemerintah sudah memberikan respon terhadap gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi. Kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi gelandangan dan pengemis, memerlukan sinergi program atau jejaring kerja dengan pihak dan instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian, jejaring kerja pada setiap tahap kegiatan belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tentu mempengaruhi hasil penanganan gelandangan dan pengemis di panti sosial.

Terbatasnya lapangan kerja di satu sisi dan masih besarnya penduduk miskin, mendorong terjadinya migrasi antar negara. Pada kenyataannya, migrasi tersebut ada yang berjalan dengan baik, namun demikian ada yang bermasalah. Habibullah, Ahmad Juhari dan Lucy Sandra melakukan penelitian tentang pekerja migran bermasalah dari perspektif kebijakan perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dilakukan Kementerian Sosial meliputi proses pemulangan, pelayanan psikososial di RPTC dan bantuan UEP bagi mantan pekerja migran. Pemenuhan kebutuhan dasar selama proses pemulangan masih terbatas pelayanan minimal, proses pelayanan di RPTC menggunakan praktek pekerjaan sosial, Bantuan UEP di beberapa daerah berhasil mengembangkan perekonomian. Peneliti memberikan sarana, agar program perlindungan sosial bagi migran tetap dilaksanakan dengan fokus pada korban tindak kekerasan. Pada prektinya perlu ada pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanah UU No. 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah tertinggal dicirikan dengan besarnya jumlah penduduk miskin dan permasalahan sosial lainnya. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial RI, pada tahun 2010 – 2014 telah memberikan perhatian terhadap daerah tertinggal di 50 kabupaten, termasuk Kabupaten Lebak Banten. Hasil penelitian Nunung Unayah memberikan informasi, bahwa di Kabupaten Lebak telah diselenggarakan berbagai program kesejahteraan sosial. Namun demikian, program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat baru program kesejahteraan anak dan PKH. Peneliti mengajukan saran perlunya *sharing budget* dari APBD I dan APBD II dalam rangka peningkatan kemanfaatan program kesejahteraan sosial, ternauk di dalamnya peningkatan jumlah dan kualitas TKSK.

Pada program pengembangan masyarakat diperlukan peran penyuluh sosial. Peran mereka sangat penting dan strategis, terutama dalam menumbuhkan dan memperkuat partisipasi masyarakat pada program kesejahteraan sosial. Hasil Penelitian Subhan Kadir, Sunarru Samsi Hariadi dan Subejo menunjukkan, bahwa interaksi kenerja dan *sense of humor* penyuluh sosial serta penggunaan *humor coping* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan program kesejahteraan sosial. Hasil penelitian akan menginspirasi pengembangan metode dan teknik-teknik yang perlu dikembangkan dalam program penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial tidak semata-mata menekankan pada aspek substantif, namun demikian juga perlu menekankan pada aspek metode dan teknis penyuluhannya.

Redaksi